

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah, dan Tax Planning terhadap Pengungkapan CSR. Berdasarkan analisis hasil pengujian data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan saham pemerintah memiliki pengaruh negative tetapi tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk perusahaan yang memiliki kepemilikan saham pemerintah atau seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan masih dianggap sebagai suatu hal yang sukarela dan dapat mengurangi laba perusahaan. Pemerintah belum berhasil dalam membuat peraturan perundang – undangan terhadap korporasi untuk mengungkapkan CSR. Jadi, perlu adanya pengawasan pemerintah yang tegas dan ketat agar semua perusahaan tidak hanya BUMN tetapi korporasi swasta lainnya bertanggung jawab dan peduli dengan sosial dan lingkungan sekitarnya.
2. *Tax planning* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan adanya kewajiban perusahaan untuk melaksanakan CSR ini, perusahaan tetap dapat melakukan *tax planning* yang baik tanpa melanggar peraturan perpajakan dan pemerintah, serta dapat menghasilkan laba yang tidak akan mengecewakan para *shareholders* dengan memanfaatkan kegiatan CSR yang akan memberikan pandangan positif bagi

kegiatan usaha perusahaan dan ini tertuang dalam perundang – undangan perpajakan juga bukan merupakan objek pajak semata.

3. Kepemilikan saham pemerintah dan *tax planning* memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Adanya kombinasi antara kepemilikan saham pemerintah dan *tax planning* merupakan beberapa faktor yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengungkapkan CSR perusahaan.

B. Kontribusi Kepemilikan Saham Pemerintah dan Perencanaan Pajak terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan, nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} dan signifikansi terpenuhi, menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima, yaitu Kepemilikan Saham Pemerintah dan Perencanaan Pajak terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Berdasarkan hasil pengujian diketahui Pengungkapan Corporate Social Responsibility dapat berhubungan dengan Kepemilikan Saham Pemerintah dan Perencanaan Pajak pada Badan Usaha Milik Negara dengan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model persamaan regresi.

Hasil ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat terlihat pada seberapa besar kepemilikan saham dimiliki, pada penelitian ini kepemilikan Pemerintah yang semakin besar belum tentu juga mengungkapkan dan memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar, karena bagi perusahaan pengungkapan CSR memerlukan biaya dan dapat mengurangi *profit* atau laba perusahaan.

Ditambahkan pula dengan beberapa BUMN yang masuk dalam rapor merah dan hitam menurut Wapres Jusuf Kalla, ternyata masih terdapat beberapa BUMN yang mencemari lingkungan dan tidak bertanggung jawab terhadap sosial di sekitar perusahaan.

Selain itu, perencanaan pajak yang berpengaruh positif menggambarkan bahwa semakin baik perencanaan yang dilakukan oleh korporasi atau perusahaan, maka perusahaan dapat mengalihkan dana yang seharusnya untuk membayar pajak tersebut untuk membiaya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Hasil penelitian ini dapat menjadi ukuran bagi perusahaan yang sebelumnya terindikasi dan terbukti menggelapkan biaya pajak untuk kepentingan individu semata, seharusnya dapat direncanakan sebaik – baiknya tanpa melakukan pelanggaran undang – undang perpajakan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki beberapa saran yang perlu disampaikan, yaitu :

1. Untuk penelitian mendatang, nantinya dapat menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat diambil kesimpulan pengungkapan CSR perusahaan – perusahaan di Indonesia.
2. Pemerintah sebaiknya memberikan regulasi yang lebih jelas tentang pengungkapan CSR perusahaan, khususnya aturan yang jelas

dalam penggunaan pedoman dalam pengungkapan CSR agar pengungkapan CSR lebih meningkat.

3. Memperluas metode pengukuran (proksi), sehingga dapat membandingkan antar metode pengukuran yang satu dengan yang lain.
4. Tingkat R² masih rendah sehingga untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel atau menggunakan variabel lain selain yang digunakan dalam penelitian ini.